

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM UPAYA  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI  
(Studi di Kabupaten Tanah Datar)**

**Yulfira Media**

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat  
Email: yulfiramedia@gmail.com

**ABSTRAK**

Beberapa program/kegiatan pemberdayaan sudah cukup banyak dilaksanakan, namun realitasnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan merumuskan alternatif strategi kebijakan yang mendukung keberhasilan kegiatan pemberdayaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan Fokus Grup Diskusi (FGD). Informan penelitian adalah ketua kelompok/anggota kelompok petani dan pengelola program pemberdayaan di Kabupaten/Kecamatan/Nagari, sedangkan peserta FGD adalah ketua/anggota dari kelompok petani yang dianggap berhasil dan kurang berhasil. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan kaidah kualitatif dengan metode *content analysis*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang turut mendukung keberhasilan pemberdayaan diantaranya partisipasi dan keaktifan kelompok dalam menyusun perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan pengawasan, dukungan aktif dari tenaga penyuluh/pendamping, kemampuan penyuluh dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah kurangnya partisipasi dan keterbukaan terhadap kelompok, kurangnya motivasi dan kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan. Alternatif kebijakan yang disarankan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani adalah peningkatan pembinaan dan pendampingan, peningkatan kapasitas SDM petani, dan peningkatan sarana prasarana, akses modal, pemasaran dan dukungan lintas sektor.

**Kata Kunci:** pemberdayaan masyarakat, kebijakan, kesejahteraan petani

**ABSTRACT**

*Several empowerment programs/activities have been implemented quite a lot, but in reality the implementation of these programs/activities has not been optimal to improve the welfare of the community. The research objectives are to identify the factors that influence the success and failure of community empowerment activities, and to formulate alternative policy strategies that support the success of empowerment activities in an effort to improve farmers' welfare. The study used qualitative research methods, and data collection techniques were carried out by in-depth interviews and Focus Group Discussions (FGD). Research informants are group leaders/members of farmer groups and managers of empowerment programs in districts/sub-districts/Nagari, while FGD participants are chairpersons/members of farmer groups who are considered successful and less successful. The data that has been collected is then processed and analyzed using qualitative rules with the method of content analysis. The results of the study revealed that there were several factors that contributed to the success of empowerment including participation and group activity in planning activities, implementation, and supervision, active support from extension workers/companions, and the ability of extension workers to communicate with the community. Factors that hinder the success of community empowerment activities include lack of participation and openness to groups, lack of motivation and community awareness to be involved in planning. The suggested alternative in an effort to improve the welfare of farmers is to increase guidance and assistance, increase the capacity of human resources for farmers/breeders, and improve infrastructure, access to capital, marketing and cross-sectoral support.*

**Keywords:** community empowerment, policy, farmer welfare

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai negara, dan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya (Hikmat, 2010). Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan hakikat pembangunan nasional. Kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat ini mencerminkan kualitas hidup dari suatu keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, sehingga keluarga tersebut dianggap mampu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Rosni, 2012).

Pemberdayaan melalui pengembangan masyarakat harus dilakukan secara terencana, dan hasilnya akan memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Pemberdayaan individu, kelompok, ataupun komunitas berupaya untuk memutuskan apa yang menjadi tujuan masa depan dan apa yang mereka harapkan. Mereka yang akan menentukan apa saja yang menjadi kebutuhan mereka dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dengan didasarkan kesamaan masalah dalam kehidupan mereka, sangat efektif jika kesadaran solidaritas dengan identitas yang seragam akan menunjukkan kemampuan yang besar untuk perubahan (Teja, 2015).

Keberhasilan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Menyadari hal tersebut, maka pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan beberapa program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor pembangunan, sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat (2016-2021). Berbagai program/ telah dilaksanakan dalam membangun pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani, diantaranya adalah kegiatan pemberdayaan kelembagaan petani, pemberdayaan petani di lokasi Gerakan Terpadu Kesejahteraan Petani, dan pengembangan Kelembagaan Tani (Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, 2019).

Walaupun beberapa program/kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah diimplementasikan, namun realitasnya di lapangan bahwa program/kegiatan tersebut belum dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut diantaranya adalah terkait permasalahan hambatan sosial budaya, yaitu adanya hambatan perilaku seperti kurangnya pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hambatan lainnya terkait dengan kelembagaan, lemahnya pendampingan, hambatan kebijakan keuangan, diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku bangsa, sistem administrasi yang terlalu demokratis, terbatasnya sumber daya manusia, peran tengkulak dan rentenir, program hibah, dan terbatasnya jangka waktu dan keberlanjutan (Santoso et all, 2016). Selanjutnya juga ada masalah struktural, mekanisme pengawasan dan monev serta koordinasi antar Lembaga yang belum berjalan. Profesionalitas pendamping dan ketua kelompok pemberdayaan serta sarana dan prasarana yang dimiliki juga memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Daraba, 2015).

Prinsip dasar kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat agar dapat dapat mengatasi permasalahannya dengan inisiatif dan kekuatan sendiri. Kegiatan pemberdayaan diarahkan pada upaya untuk mendorong dan memobilisasi sumber-sumber sosial sehingga masyarakat dapat menyatakan kebutuhannya, menggali kemampuan dan memanfaatkan potensi sumber lokal yang tersedia. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial budaya (Hikmat, 2010).

Beberapa penelitian terkait kegiatan pemberdayaan diantaranya penelitian Nisa Hafizhotus Syarifa (2019), yang mengungkapkan bahwa masyarakat yang terdapat di Kampung Batik, Kota Semarang turut berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan wilayahnya, dengan melakukan strategi kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan. Sebaliknya pemerintah hanya melakukan pengawasan, memberikan stimulus dan bantuan yang dapat mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut melalui program Kampung Tematik, yang dapat dilihat dalam tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Penina Yettu (2016) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kampung Moskona di Distrik Bintuni merupakan sarana yang efektif sebagai upaya memperoleh kepercayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, dan hal ini akan mendorong bagi masyarakat untuk mau melaksanakan program pembangunan. Kemudian penelitian yang dilakukan Yudan Hermawan dan Yoyon Suryono (2016) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PKBM Ngudi Kapinteran Semanu, Gunung Kidul yaitu faktor pendukung berupa budaya dan kebermanfaatan program sedangkan faktor penghambatnya adalah tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Adapun strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program PKBM Ngudi Kapinteran, yaitu melalui komunikasi, keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan komunitas. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2013) mengungkapkan bahwa pembangunan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih belum terwujud. Dalam hal ini masyarakat belum menjadi subjek pembangunan, tetapi masih menjadi objek pembangunan. Masyarakat lokal belum pernah terlibat untuk mendesain sendiri model pariwisata yang akan dikembangkan. Pariwisata yang dikembangkan cenderung didesain oleh orang dari luar desa setempat.

Menyikapi permasalahan belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan mengingat masih

terbatasnya penelitian terkait permasalahan ini terutama kegiatan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat petani, maka tulisan ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan merumuskan alternatif strategi kebijakan yang mendukung keberhasilan kegiatan pemberdayaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani.

## METODE

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021. Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah pegunungan dengan petani yang masyarakatnya homogen.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif interpretatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih oleh peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian yang dilaksanakan peneliti. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan primer. Data atau informasi yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen dari Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, maupun sumber-sumber lain yang sesuai dengan standar keilmiah sumber data. Data-data tersebut berupa buku-buku, laporan hasil-hasil penelitian yang relevan, jurnal/artikel hasil penelitian, dokumen dari instansi terkait.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) menggunakan pedoman wawancara. Sasaran penelitian adalah kelompok petani penerima manfaat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada instansi terkait. Kelompok penerima manfaat ini terdiri dari kelompok yang gagal dan berhasil dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan kepada sejumlah informan. Kriteria informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap mampu dalam memberikan informasi atau mempunyai pengalaman terkait program pemberdayaan masyarakat yaitu, ketua kelompok, anggota kelompok, pengelola program pemberdayaan di Kabupaten/ Kecamatan/Nagari,

tenaga konsultan/pendamping. Jumlah informan adalah berdasarkan kecukupan informasi yang telah diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan kaidah kualitatif dengan metode *content analysis*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kegiatan Pemberdayaan di Kabupaten Tanah Datar**

Dubois dan Miley dalam Wrihatnolo (2007) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses menyeluruh yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diperdayakan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa ada beberapa faktor yang turut mendukung keberhasilan pemberdayaan yaitu partisipasi dan keaktifan kelompok dalam menyusun perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan pemantauan, yang mana hal ini merupakan hal yang sangat mendukung dalam aspek penyelenggaraan pemberdayaan. Partisipasi menurut Najati merupakan salah satu prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat (Najati dkk, 2005).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi anggota kelompok yang aktif bisa terlihat dari keaktifan mereka dalam melaksanakan pertemuan kelompok secara rutin (setiap bulan) untuk mendiskusikan perkembangan kelompok, mengemukakan hambatan/permasalahan yang dihadapi dan berbagai pengalaman/ketrampilan, dan biasanya

didampingi oleh penyuluh. Dalam hal ini partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk kehadiran rapat, tetapi juga terlibat aktif secara bermusyawarah memberikan pendapat untuk perencanaan kegiatan pemberdayaan terutama kegiatan yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat petani. Terkait dengan hal ini Aminah menyatakan bahwa pertemuan rapat rutin kelompok dapat dimanfaatkan sebagai media dialog yang efektif untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, ketrampilan antara petani, tokoh formal/informal dengan pendamping, penyelenggara program/penyuluh dan pakar. Petani berkesempatan mengemukakan masalah, kendala dan menemukan solusi sementara pendamping dan penyelenggara program/penyuluh memperoleh informasi akurat tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi petani guna perbaikan kebijakan dan program (Aminah, 2015).

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kekompakan kelompok juga penting untuk mendukung keberhasilan kegiatan pemberdayaan, dan hal ini tentunya didukung oleh keaktifan pengurus, adanya motor penggerak, adanya yang dituakan dan adanya keterbukaan informasi serta motivasi dari anggota untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan. Selanjutnya terkait dengan dukungan peran dan keaktifan tenaga penyuluh, yang mana hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran dan keaktifan penyuluh dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat adalah merupakan hal yang penting dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini tentunya juga didukung oleh kemampuan penyuluh dalam berkomunikasi dengan masyarakat, profesionalisme, dan kemampuan untuk penguasaan teknik serta penguasaan materi.

Terkait dengan hasil penelitian diatas, Sugiri (2012) menemukan paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang dapat mendukung kelancaran proses pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) partisipasi masyarakat, (2) tingkat pendidikan masyarakat, dan (3) adanya dukungan dari birokrasi pemerintahan local. Hasil penelitian Daraba (2015) menemukan profesionalitas pendamping dan ketua kelompok pemberdayaan serta sarana dan prasarana yang dimiliki memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menguatkan pendapat tersebut proses pemberdayaan masyarakat hanya

akan berhasil apabila ditopang oleh peran *community worker* ini baik (pendamping), dalam hal dari lembaga-lembaga pendamping pemerintah (*government institutions*) ataupun pendamping dari lembaga-lembaga non pemerintah (*non-government institutions*) (Sugiri, 2012).

Dukungan sarana prasarana atau alat mesin pertanian dianggap turut mendukung keberhasilan kegiatan pemberdayaan. Alat mesin pertanian ini adalah seperti kultivator (bajak tanah kering) untuk kebun. Selanjutnya juga dukungan sumber daya, yang mana salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan gabungan kelompok tani adalah sumber daya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Reswari juga mengungkapkan bahwa faktor yang sangat mendukung dalam kegiatan pemberdayaan pertanian tangguh masukan lokal pada kelompok tani Mekar sari adalah motivasi, selain itu juga ada sumberdaya baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia yang mendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian tangguh masukan local (Reswari, 2015)

Keberhasilan pemberdayaan pada beberapa kelompok juga didukung oleh adanya nilai-nilai sosial budaya atau modal social (*social capital*) dari masyarakat setempat. Dalam hal ini keberhasilan kegiatan pemberdayaan juga dipengaruhi pentingnya keberadaan tokoh masyarakat atau orang yang dituakan dalam kepengurusan kelompok (ketua atau sekretaris). Keberadaan mereka bisa menjadi motivasi, motor penggerak dalam pelaksanaan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya adanya nilai kebersamaan dan kegotongroyongan di dalam masyarakat juga merupakan hal yang turut mendukung dalam keberhasilan kegiatan pemberdayaan. Keberadaan tokoh masyarakat dan adanya nilai-nilai gotong royong merupakan modal modal (*social capital*) yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan hal ini, hasil penelitian Daraba juga menemukan bahwa keberhasilan suatu program juga dipengaruhi oleh individu sebagai “key individual” dalam struktur kekuasaan dari masyarakat penerima manfaat, yaitu antara lain adalah mereka tokoh-tokoh informal seperti misalnya pemuka agama, petani kaya, atau pedagang kaya. Dalam hal ini ketika pembentukan pengurus/ketua kelompok, maka yang perlu mendapat perhatian adalah mereka

yang tergolong dalam kelompok “key individual” ini (Daraba, 2015). Hasil penelitian Aminah menemukan bahwa faktor pelibatan lingkungan sosial (tokoh informal dan kelembagaan) tergolong rendah, padahal pelibatan tokoh (*opinion leader*) dan kelembagaan masyarakat sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pemberdayaan (Aminah, 2015). Selanjut pemberdayaan masyarakat menurut Hikmat adalah sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial budaya (Hikmat, 2010).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat/permasalahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dari aspek penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan diantaranya adalah kurangnya partisipasi dan keterbukaan terhadap kelompok. Kondisi kurangnya partisipasi masyarakat terutama pada kelompok yang kurang berhasil terkait dengan motivasi dan kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan yang relative kurang. Pertemuan dilakukan kurang lebih 3 kali dalam satu tahun, dan pertemuan ini cenderung dilakukan ketika masyarakat mau menanam padi (*bakaul*), dan biasanya partisipasi masyarakat untuk berkumpul pada waktu itu cukup banyak, sehingga petani bisa bermusyawarah untuk mendiskusikan segala informasi terkait kelompok. Sedangkan keinginan kelompok untuk berkumpul di luar jadwal waktu tanam padi tersebut dianggap relatif kurang. Salah satu alasan masyarakat tidak bisa hadir pada pertemuan kelompok adalah karena kesibukan untuk mencari kebutuhan ekonomi keluarga, dan hal ini juga dilatarbelakangi oleh keterbatasan pengetahuan, sikap dan mentalitas dari masyarakat petani. Terkait hal ini Reswari menyatakan bahwa faktor penghambat yang dihadapi setiap orang berbeda, namun hal yang paling menghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pertanian

tangguh masukan lokal ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh petani masih sedikit (Reswari, 2015). Selanjutnya menurut Sugiri bahwa penghambat proses pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah terkait dengan norma yang bersifat negatif dan persepsi yang terbentuk di masyarakat (Sugiri, 2012).

Hambatan lainnya yang ditemukan dalam penelitian adalah terkait dengan keterbatasan jumlah (kuantitas) sumberdaya penyuluh. Dengan keterbatasan jumlah personil yang terdapat di seluruh kecamatan, maka kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada petani tidak dapat dilakukan secara optimal dilaksanakan. Disamping itu, juga terdapat masih terbatasnya kapasitas kelembagaan petani. Hal ini antara lain terkait dengan persoalan kelembagaan petani yang dibentuk cenderung untuk mendapatkan bantuan, sehingga motivasi dan kepedulian anggota terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan juga terbatas.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa sebagian anggota belum merasakan ada manfaatnya kegiatan berkelompok atau adanya kelembagaan petani. Dalam hal ini belum ada kekompakan dari masing-masing anggota kelompok dan kurangnya komitmen anggota kelompok untuk bisa hadir dalam pertemuan kelompok, yang mana ada kelompok yang ketuanya tidak aktif, namun sebagian anggotanya aktif. Motivasi, kesadaran dan rasa kebersamaan anggota kelompok anggota masih kurang. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan masih ada yang dianggap belum tepat sasaran, dan dukungan serta koordinasi dengan pemerintahan nagari dianggap masih belum optimal. Hambatan dari aspek social budaya terkait dengan pola pikir, sikap dan mental petani untuk cenderung ingin menerima saja (motivasi menerima bantuan), adanya perilaku yang kurang baik, adanya peran toke dalam akses permodalan (kebiasaan meminjam dengan toke). Terkait dengan hal ini, Santosa mengemukakan bahwa ada beberapa hambatan terhadap pengembangan atau pelaksanaan kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-sungguh, hambatan perilaku, peran tengkulak/toke, adanya program bantuan/hibah,

Indikator yang tidak tepat, kelembagaan dan lemahnya pendampingan, kurangnya koordinasi lintas sektor (Santosa *et al.*, 2016). Terkait belum optimalnya pembinaan dan pendampingan kepada petani, Aminah dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa agen pembangunan (pendamping/ fasilitator/penyuluh) memiliki peran penting dalam pemberdayaan petani kecil, sehingga sangatlah penting untuk menyiapkan pendamping/ fasilitator/penyuluh melalui rekrutmen dengan seleksi berdasarkan kualifikasi yang ditentukan disertai pelatihan dengan penguatan materi pengembangan masyarakat. Selanjutnya kemampuan teknik budidaya (tanaman/ternak) dan kemampuan non teknis yaitu kemampuan membangun kesadaran, bekerja sama dan memfasilitasi sekaligus membangun dialog sebagai sarana berbagi pengetahuan dan ketrampilan dengan petani merupakan jaminan sukses keberhasilan program pemberdayaan (Aminah, 2015).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa beberapa pelatihan untuk peningkatan pengetahuan/ketrampilan sudah diikuti sebagian masyarakat, namun kendalanya terkait dengan persoalan teknologi. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan cenderung berasal dari atas, dan kemampuan sebagian sumberdaya masyarakat untuk memanfaatkan teknologi relatif belum memadai, sehingga keberlanjutan kegiatan cenderung kurang optimal. Begitu juga bantuan-bantuan sudah diberikan kepada masyarakat, tetapi keberlanjutannya kurang, sedangkan masyarakat keinginannya selalu ingin dibantu atau cenderung ingin mendapatkan bantuan. Kemudian saat ketika sudah tidak ada bantuan lagi cenderung berhenti dan tidak berlanjut lagi kegiatannya.

### **Strategi/Alternatif Kebijakan Yang Mendukung Keberhasilan Pemberdayaan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Berdasarkan gambaran hasil penelitian diatas berikut dirumuskan kebijakan yang mendukung keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani, yang dilakukan secara komprehensif atau terintegrasi dengan arah kebijakan dan rencana aksi yang melibatkan lintas sektor, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1. Strategi/Arah Kebijakan dan Rencana Aksi/Alternatif Kegiatan Yang Mendukung Keberhasilan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Dalam Upaya Peningkatan kesejahteraan Petani**

No.	Alternatif Strategi/Arah Kebijakan	Rencana Aksi/Alternatif Kegiatan	Penanggung awab
1	* Peningkatan pembinaan dan pendampingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada petani terkait usaha pertanian secara rutin dan berkelanjutan</li> <li>2. Peningkatan bimbingan dan pembinaan dari instansi terkait secara berkesinambungan dan berkelanjutan</li> <li>3. Peningkatan peran dan keaktifan tenaga penyuluh/pendampingan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok sasaran</li> </ol>	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov/Kab/Kota
2	* Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM petani melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, bimbingan teknis terkait dengan usaha pertanian, usaha, penerapan teknologi, pemasaran secara online, pengelolaan keuangan dan administrasi laporan</li> <li>2. Optimalisasi penguatan peran dan kualitas/kompetensi tenaga penyuluh/pendamping melalui pelatihan-pelatihan seperti pelatihan tentang penerapan teknologi dan penggunaan IT, cara berkomunikasi, penguasaan materi dan cara mengelola/menjalankan kegiatan pemberdayaan</li> <li>3. Peningkatan kuantitas SDM penyuluh melalui rekrutmen CPNS dan tenaga honorer</li> <li>4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik (dari limbah tanaman dan kotoran hewan) sebagai pupuk alternatif</li> </ol>	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov/Kab/Kota
3	* Optimalisasi Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait penentuan kelompok sasaran</li> <li>2. Optimalisasi efektifitas pemberian bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kondisi wilayah dan geografis</li> </ol>	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov/Kab/Kota
4	Peningkatan sarana prasarana, akses modal, pemasaran dan dukungan lintas sector	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana prasarana dan dukungan lintas sektor dalam upaya peningkatan hasil usaha pertanian antara lain penyediaan alat mesin pertanian, jalan usaha tani, jalan produksi, balai-balai penyuluhan, perbaikan irigasi, dll</li> <li>2. Peningkatan akses permodalan melalui simpan pinjam dan koperasi kelompok</li> <li>3. Peningkatan informasi dan jaminan harga pasar</li> </ol>	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov/Kab/Kota
5	Optimalisasi peningkatan keterlibatan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pertemuan kelompok secara aktif, rutin (tiap bulan) dan penyediaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi anggota kelompok</li> <li>2. Peningkatan peran dan keaktifan tenaga penyuluh dan ketua kelompok dalam mendorong/menggerakkan kelompok dan melakukan</li> </ol>	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov/Kab/Kota

		pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat 3. Peningkatan peran dan keterlibatan tokoh masyarakat, kepala desa/wali jorong dalam kegiatan pemberdayaan	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Alternatif kebijakan dalam upaya mendukung keberhasilan pemberdayaan pada tabel 1 di atas diantaranya adalah melalui peningkatan pembinaan dan pendampingan. Terkait dengan hal ini hasil studi Aminah mengungkapkan bahwa kualitas program mempunyai dampak yang kuat terhadap keberdayaan petani, yang mana aspek keberlanjutan program memiliki pengaruh terbesar terhadap keberdayaan petani disusul pelibatan lingkungan sosial dan komunikasi program. Kondisi tidak berlanjutnya program pemberdayaan karena cenderung dikelola sebagai pemberian bantuan (dana, input dan alat pertanian) tanpa disertai peningkatan kapasitas dan pendampingan yang efektif. Pendampingan program bersifat temporer, jika program berakhir maka pendampingan juga berakhir, walaupun tidak terjadi perubahan positif pada perilaku petani (Aminah, 2015). Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan hendaknya diimplementasikan secara berkelanjutan, dan tidak hanya sekedar pemberian bantuan pinjaman modal dan alat-alat pertanian, tetapi penting disertai pengembangan kapasitas dan pendampingan hingga tercapainya perubahan perilaku positif petani (pengetahuan/persepsi, sikap/mentalitas dan ketrampilan). Penerapan pendekatan partisipatif dalam implementasi program menempatkan petani sebagai peserta aktif dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan hingga pemanfaatan hasil. Pertemuan rapat rutin kelompok dapat dimanfaatkan sebagai media diskusi yang efektif untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, ketrampilan antara petani, tokoh formal dan informal dengan pendamping, penyelenggara program, penyuluh/pakar. Pada saat dilakukan diskusi atau musyawarah, petani mempunyai peluang untuk menyampaikan permasalahan, hambatan dan menemukan solusi, dan hasil informasi dari petani tersebut bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan kebijakan dan program. Selanjutnya dukungan pelibatan tokoh desa/nagari dapat memainkan peran penting untuk menggalang partisipasi dan mediasi penyelesaian konflik yang mungkin

terjadi pada saat kegiatan pemberdayaan dilaksanakan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang turut mendukung keberhasilan pemberdayaan antara lain adalah partisipasi dan keaktifan kelompok dalam menyusun perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan pengawasan/pemantauan, dukungan aktif dari tenaga penyuluh/pendamping untuk melakukan pembinaan dan pendampingan, kemampuan penyuluh dalam berkomunikasi dengan masyarakat, profesionalisme, dan kemampuan untuk penguasaan teknik serta penguasaan materi. Faktor yang menjadi penghambat/permasalahan keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari aspek penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan diantaranya adalah kurangnya partisipasi dan keterbukaan terhadap kelompok, kurangnya motivasi dan kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan yang relative kurang. Hambatan lainnya terkait dengan belum optimalnya pembinaan dan pendampingan, masih terbatasnya sumberdaya manusia, belum optimalnya pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa kebijakan dan kegiatan yang disarankan untuk mendukung keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani adalah peningkatan pembinaan dan pendampingan, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani, peningkatan sarana prasarana, akses modal, pemasaran dan dukungan lintas sector, dan Optimalisasi peningkatan keterlibatan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan

### DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., Sumardjo, Lubis, D., dan Susanto, D., 2015. Strategi Peningkatan Keberdayaan Petani Kecil Menuju Ketahanan Pangan. *Sosiohumaniora*, Volume 18 No. 3 November 2015
- Dewi, MHU, 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Kawistara*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2013: 129-139
- Daraba, D. (2015) "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan," *Sosiohumaniora*, 17(2), Pp. 168-169.
- Dinas Tanaman Pangan Holitikultura dan Perkebunan 2019. Laporan tahunan tahun 2019.
- Hermawan, Y, 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran, *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* Volume 3 – Nomor 1, Maret 2016, (97 - 108).
- Hikmat H, 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, cetakan ke 5. Bandung: Humania Utama Press.
- Reswari MM., 2015. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pertanian Tangguh Masukan Lokal Pada Kelompok Tani Mekar Sari Desa Curugsewu Kecamatan Patean Kendal. Skripsi pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Rosni, 2012. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*.
- Santosa, S. H. *et al.* (2016) "Pengembangan pola kemitraan dalam rangka pengentasan.
- Sugiri, L., 2012. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Publica*, Vol. 2 No.1 2012.
- Syarifa NH dan Wijaya A, 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan melalui Program Kampung Tematik (Studi Kasus di Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang), *SOLIDARITY* 8 (1) (2019).
- Teja, Mohamad, 2015. Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Aspirasi* Vol. 6 No. 1, Juni 2015.
- Wrihatnolo, RR, Dwidjowijoto RN, 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta; PT. Gramedia.
- Yettu P, 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung Moskona di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 3, no. 1, 2016